

PERUBAHAN SISTEM POLITIK KERAJAAN SAWITTO PASCA PERLAWANAN TERHADAP KOLONIAL BELANDA (1905-1906)

Zulfahmi¹, Musyarif², A. Nurkidam³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare¹²³

zulfahmi@iainpare.ac.id¹, musyarif@iainpare.ac.id², anurkidam@iainpare.ac.id³

Abstract

This study focuses on the Sawitto Kingdom's resistance against the Dutch colonial government, emphasizing the conflict process between the kingdom and the colonial administration, as well as the impacts of that resistance. To examine this, the author employs a historical method consisting of four stages: data collection (heuristics), source criticism, interpretation, and historiography, with socio-political analysis. This research reveals that Sawitto's resistance in the early 20th century was driven not only by opposition to the mandatory taxed port policy that imposed import, export, and harbor duties but also by Dutch colonial interference in Sawitto's domestic affairs. Ultimately, the conflict was won by the Dutch Colonial Government, marking the integration of colonial power in Sawitto. This resulted in changes to the local political system, including the Dutch assumption of royal authority and the reduction of the Sawitto king's role to a symbolic figure.

Keywords: *Dutch Colonial; Resistance; Sawitto*

Abstrak

Penelitian ini berkonsentrasi pada perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ini menekankan proses perselisihan antara kerajaan dan pemerintah kolonial, serta efek dari perselisihan tersebut. Penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah: pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan analisis sosial politik untuk menjelaskan hal ini. Penelitian ini menemukan bahwa perlawanan Sawitto pada awal abad ke-20 terutama disebabkan oleh penolakan terhadap kebijakan pelabuhan wajib pajak yang memungut cukai impor, ekspor, dan pajak pelabuhan. Selain itu, campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam urusan domestik Kerajaan Sawitto juga merupakan faktor. Konflik ini akhirnya diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda, memulai konsolidasi kekuasaan kolonial di Sawitto. Hal ini berdampak pada perubahan sistem politik lokal, seperti pengambilan wewenang raja oleh Belanda dan pembatasan peran raja Sawitto menjadi sekadar simbol. Kekalahan Sawitto menandai integrasi kekuasaan kolonial di wilayah tersebut dan memicu transformasi dalam sistem politik lokal, di mana peran raja dibatasi sebagai simbol tanpa kekuasaan administratif. Temuan ini memberikan wawasan mengenai dampak kolonialisme terhadap dinamika politik dan posisi kerajaan lokal dalam sistem kolonial.

Kata Kunci: *Kolonial Belanda; Perlawanan; Sawitto*

Pendahuluan

Menjelang abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda mulai memperluas fokus kekuasaan mereka ke wilayah di luar Jawa dan Madura. Perluasan ini bukan hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang strategis. Kekhawatiran utama Belanda adalah kemungkinan terbentuknya aliansi antara kerajaan-kerajaan lokal di luar Jawa dengan kekuatan asing yang dapat mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Dengan mengintensifkan kontrol di wilayah-wilayah ini, Pemerintah Hindia Belanda berupaya mencegah fragmentasi politik yang berpotensi menggoyahkan dominasi mereka di Nusantara.¹

Dalam rangka memperkuat kendali politik di luar Jawa, Belanda mengimplementasikan kebijakan yang dikenal dengan istilah *politiek pasificatie* atau kebijakan pasifikasi. Kebijakan ini, meskipun secara literal berarti "kebijakan perdamaian," berfokus pada penggunaan kekuatan militer untuk menundukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat. Melalui kebijakan ini, Belanda secara bertahap berusaha mengintegrasikan kerajaan-kerajaan lokal ke dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Strategi ini dianggap penting bagi Belanda, sebab tanpa dominasi politik yang menyeluruh, penguasaan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut tidak akan berjalan maksimal.²

Di Sulawesi Selatan, kebijakan pasifikasi yang dilakukan oleh Belanda berimplikasi besar bagi kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kerajaan Sawitto. Kerajaan-kerajaan di wilayah ini, sejak Perjanjian Bungaya tahun 1667, dianggap sebagai sekutu yang harus mengakui Belanda sebagai pelindung dan perantara mereka.³ Dengan pengakuan ini, Belanda memberikan status merdeka secara nominal kepada kerajaan-kerajaan tersebut, namun pada kenyataannya, posisi mereka semakin berada di bawah kontrol kolonial. Dalam kondisi ini, Belanda memiliki legitimasi untuk mengintervensi berbagai aspek dalam urusan kerajaan, termasuk pengangkatan penguasa baru, yang sering kali menimbulkan konflik dan ketegangan.⁴

Upaya Belanda untuk memperkuat kontrol mereka di Sulawesi Selatan mendapat tantangan besar dari para penguasa lokal yang merasa kedaulatan mereka terancam. Kerajaan Sawitto menjadi salah satu kerajaan yang terlibat langsung dalam

¹Muhammad Amir, "Perlawanan Sawitto Terhadap Belanda Di Sulawesi Selatan Pada 1905-1906," *Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 9, no. 1 (2019): 1–21.

²Edward L. Poelinggomang, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2* (Makassar: Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, 2005).

³Ahmad Yani, "DAMPAK PERANG MAKASSAR TERHADAP UMAT ISLAM SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII," *Jurnal Rihlah* (2018).

⁴Ahmad Yani, *Melintasi Rentang Waktu Eksistensi Masyarakat Bugis- Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*, ed. Saidin Hamzah, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).

perlawanan terhadap kebijakan kolonial ini. Pada tahun 1905, Kerajaan Sawitto di Ajatappareng menolak tuntutan Belanda, yang kemudian memicu ekspedisi militer dari pihak kolonial untuk menundukkan Sawitto. Dalam perlawanan ini, muncul sosok La Sinrang sebagai pemimpin lokal yang gigih melawan dominasi kolonial.⁵

Perlawanan yang dipimpin oleh La Sinrang di Sawitto menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap dominasi kolonial Belanda. Dengan strategi gerilya, La Sinrang berhasil melancarkan berbagai serangan yang menantang kekuatan militer Belanda di Sulawesi Selatan. Serangan-serangan tersebut tidak hanya terjadi di Sawitto, tetapi juga di beberapa wilayah lain seperti Jampue, Alitta, dan Suppa. Aksi La Sinrang dan pasukannya menunjukkan upaya gigih masyarakat lokal dalam mempertahankan kedaulatan mereka dari kekuasaan kolonial.

Dalam upaya meredam perlawanan yang dilancarkan oleh La Sinrang, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menggunakan berbagai strategi, termasuk bujukan dan ancaman. Ketika pendekatan ini gagal, Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting di Sawitto, termasuk ayah dan istri La Sinrang, sebagai bentuk tekanan agar ia menyerah. Namun, La Sinrang tetap melanjutkan perjuangannya hingga akhirnya ia tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Kendati demikian, semangat perlawanan La Sinrang terus dikenang sebagai bentuk upaya mempertahankan identitas dan kedaulatan lokal.

Setelah perlawanan di Sawitto dipadamkan, Belanda mulai memperkenalkan perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan lokal. Kerajaan Sawitto dan wilayah sekitarnya diintegrasikan ke dalam sistem administrasi kolonial yang baru. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kolonial adalah membagi wilayah Sulawesi Selatan menjadi beberapa afdeling atau wilayah administratif, termasuk afdeling Parepare, di mana Sawitto berada. Sistem ini memperlihatkan dominasi langsung Belanda, dengan penguasa lokal yang hanya berfungsi sebagai pemimpin simbolis.⁶

Pengintegrasian Sawitto ke dalam sistem pemerintahan kolonial mengakibatkan penghapusan sebagian besar kedaulatan lokal. Raja Sawitto dan bangsawan lokal mulai kehilangan kendali atas kekuasaan politik mereka, yang kini beralih ke tangan pejabat kolonial. Posisi mereka sebagai pemimpin kerajaan hanya tersisa dalam bentuk simbolis, dengan kewenangan yang terbatas di bawah pengawasan asisten residen Belanda. Hal ini secara perlahan mengikis otonomi Sawitto sebagai kerajaan merdeka.

⁵Abd. Latif, "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906 Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis Di Sulawesi Selatan" (Universitas Kebangsaan Malaysia, 2012).

⁶Tim Penyusun, *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang* (Pinrang: Daerah Tingkat II Kab. Pinrang, 1988).

Di sisi lain, struktur birokrasi baru yang diperkenalkan Belanda menggantikan sistem tradisional kerajaan di Sawitto. Peran residen atau asisten residen Belanda menjadi sentral dalam pengaturan pemerintahan lokal, sementara otoritas raja semakin dibatasi. Melalui pembentukan pemerintahan kolonial ini, Sawitto mengalami transformasi dari sebuah kerajaan yang merdeka menjadi bagian dari sistem kolonial Hindia Belanda. Kendali kolonial yang semakin kuat membatasi peran kerajaan dalam menjaga identitas budaya dan politik mereka.

Meski perlawanan Kerajaan Sawitto akhirnya dapat dipadamkan, sejarah perjuangan mereka tetap menjadi simbol penting bagi identitas lokal. Semangat La Sinrang dan rakyat Sawitto dalam melawan Belanda mencerminkan usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat kerajaan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah kolonial di Sulawesi Selatan, tetapi juga menunjukkan bagaimana identitas dan kedaulatan lokal berusaha bertahan di tengah dominasi kolonial.

Penelitian ini memfokuskan terhadap dinamika politik Kerajaan Sawitto pasca perlawanan terhadap Kolonial Belanda (1905-1906) dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yang menenmpuh empat tahapan kritis: Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik sumber, Interpretasi dan Historiografi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosial politik. Penelitian ini juga memanfaatkan metode library research (penelitian Pustaka) dalam pengumpulan data

Latar Belakang Ekspedisi Belanda ke Sawitto

Menjelang abad ke-20, Pemerintah Belanda semakin mengalihkan perhatian mereka ke wilayah di luar Jawa dan Madura, bukan hanya karena kepentingan ekonomi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan strategis dalam konteks politik kolonial. Kekhawatiran utama pemerintah kolonial adalah kemungkinan terbentuknya aliansi antara kerajaan-kerajaan lokal dengan kekuatan asing, yang dianggap dapat mengancam integrasi politik kolonial Belanda. Untuk mencegah fragmentasi politik dan memperkuat kontrol teritorial di luar Jawa, pemerintah Belanda merasa perlu untuk mempercepat dominasi politik di wilayah tersebut. Langkah ini dianggap krusial, karena tanpa pengendalian politik yang kuat, penguasaan ekonomi tidak akan berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melancarkan operasi militer, terutama terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan kolonial mereka.⁷

⁷M Amir and S Kila, "Perlawanan Rakyat Ajatappareng: Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda Di Sulawesi Selatan Tahun 1905-1906," (*No Title*) (2013), <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794594695424>.

Ekspansi kekuasaan dan pengaruh Belanda melalui aksi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan berdaulat dikenal dengan istilah "politik pasifikasi" (*pacificatie politiek*). Meskipun secara harfiah istilah ini berarti kebijakan perdamaian, tujuan utamanya adalah untuk menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda yang secara hukum berada di bawah otoritas Belanda, meskipun masih ada kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, pelaksanaan politik pasifikasi ini melibatkan pengiriman pasukan militer untuk menundukkan kerajaan-kerajaan yang masih independen, yang oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai sekutu.⁸

Kebijakan ini juga berdampak pada kerajaan yang dibawah otoritas Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai "Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya" (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Meskipun demikian, kendali Belanda atas wilayah tersebut belum sepenuhnya ada. Ada tiga kategori hubungan politik antara Belanda dan kerajaan-kerajaan di wilayah ini. Salah satunya kerajaan sekutu yang disebut *bondgenootschappelijke landen*. Berdasarkan Perjanjian Bungaya (1667), kerajaan sekutu ini diminta untuk mengakui Belanda sebagai "pelindung dan perantara", dan mereka menerima pengakuan resmi sebagai wilayah yang merdeka dan berdaulat. Kondisi ini sering menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah Belanda.⁹

Bagi penguasa setempat, pengakuan sebagai kerajaan merdeka dan berdaulat oleh Belanda menunjukkan pengakuan resmi atas status sejajar kerajaan-kerajaan tersebut. Namun, penerimaan Belanda sebagai pelindung dan perantara pada akhirnya menempatkan kerajaan-kerajaan ini dalam status protektorat di bawah Belanda. Konsekuensinya, keterlibatan Belanda dalam urusan antar kerajaan, termasuk proses pemilihan dan pengangkatan penguasa baru, sering kali dianggap sebagai tindakan aneksasi, yang kemudian memicu konflik. Kondisi ini mendorong pemerintah Hindia Belanda di Makassar pada tahun 1900 untuk mengumumkan penghentian kebijakan pelabuhan bebas bagi kerajaan-kerajaan sekutu, yang kemudian diikuti dengan kewajiban membayar ganti rugi berupa pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, serta aturan lain terkait pelayaran dan perdagangan.¹⁰

Dalam hal ini, CA Kroesen, Gubernur Sulawesi, merekomendasikan pada 11 Februari 1904 kepada pemerintah pusat Batavia untuk mengambil tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang menentang kebijakan pajak pelabuhan. Setelah

⁸Ahmad Yani and M Hum, *SEJARAH LOKAL SULAWESI SELATAN: MENYUSURI EKSISTENSI KEDATUAN SAWITTO DI AJATAPPARENG ABAD XVI-XVII*, 2022.

⁹Poelinggomang, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*.

¹⁰Amir, "Perlawanan Sawitto Terhadap Belanda Di Sulawesi Selatan Pada 1905-1906."

menggantikan Willem Roosenboom (1899-1904) sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Oktober 1904, Joannes Benedictus van Heutsz mulai merancang kebijakan untuk mengontrol langsung semua wilayah Hindia Belanda. Van Heutsz menyebut kebijakannya dengan istilah yang lebih diplomatis, yaitu politik perdamaian (*pacificatie politiek*), meskipun tujuan utamanya adalah untuk menaklukkan Hindia Belanda sepenuhnya, termasuk wilayah Sulawesi Selatan.

Pemerintah Hindia Belanda segera mengalihkan fokusnya ke Sulawesi Selatan untuk mengatasi berbagai hambatan, termasuk penerapan kebijakan pajak wajib. Menteri Koloni menyarankan bahwa jika negosiasi dengan kerajaan-kerajaan berdaulat mengenai besaran kompensasi tidak mencapai kesepakatan, ia tidak melihat alasan untuk menghentikan upaya perundingan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan kerajaan-kerajaan tersebut.¹¹

Gubernur Jenderal Joannes B. Van Heutsz (1904-1909) menulis surat kepada Direktur Departemen Keuangan pada 25 Januari 1905 bahwa perjanjian harus segera dibuat dengan para penguasa kerajaan berdaulat di Sulawesi Selatan untuk memberikan hak pemungutan pajak perdagangan dan aspek terkait lainnya kepada pemerintah sesuai dengan permintaan Menteri Kolonial. Selain itu, persiapan harus dilakukan untuk memungut pajak perdagangan pada 1 Januari 1906. Kerajaan berdaulat harus menyetujui hak pemerintah Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah mereka untuk melindungi kepentingan perdagangan, kata Direktur Departemen Keuangan.¹²

Gubernur Jenderal Van Heutsz memutuskan untuk menerapkan politik pasifikasi melalui tindakan militer setelah perundingan gagal. Untuk menerapkan kebijakan ini, didirikan ekspedisi militer untuk memaksa kerajaan-kerajaan yang menentang tuntutan Belanda untuk patuh. Pada April 1905, C.A. Kroesen, Gubernur Sulawesi, menyarankan Van Heutsz untuk mengalahkan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Rekomendasi ini dibuat karena kerajaan-kerajaan tersebut tidak memenuhi atau dianggap melanggar perjanjian. Kerajaan Sawitto di Ajatappareng, misalnya, menentang kekuasaan Hindia Belanda.¹³

Di Sawitto, Belanda menghadapi perlawanan sengit dari La Sinrang, yang mengandalkan taktik gerilya. Strategi ini menjadi tantangan besar bagi Belanda, karena

¹¹Poelinggomang, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*.

¹²Fachriyadi Fachriya and Ahmad Yani, "Dinamika Masyarakat Teluk Bone Di Era Gejolak DI/TII," *JAWI* 7, no. 1 (2024).

¹³A Latif, "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906: Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis Di Sulawesi Selatan," *Bangi: Disertasi Fakultas Sains Sosial dan ...* (2012).

La Sinrang dan pasukannya sering melancarkan serangan terhadap posisi Belanda di berbagai tempat, termasuk Sawitto, Jampue, Alitta, dan Suppa. Ketika Sultan Husain, Raja Gowa, tiba di Sawitto, ia bersekutu dengan La Sinrang untuk melawan penjajah. Pada 6 Januari 1906, terjadi pertempuran besar antara pasukan La Sinrang dan Belanda, yang berakhir dengan gugurnya Kapten de Gruyter di medan pertempuran.¹⁴

Untuk meredakan serangan yang dilancarkan oleh La Sinrang dan pasukannya, Pemerintah Hindia Belanda berusaha membujuk para pemimpin pasukan La Sinrang agar bekerja sama dan mengakhiri konflik. Namun, usaha tersebut gagal. Akhirnya, pemerintah kolonial memutuskan untuk menangkap ayah La Sinrang, La Tamma, Addatuang Sawitto, serta istri La Sinrang, I Makkanyuma. Keduanya diancam dengan penyiksaan jika La Sinrang tidak segera menyerahkan diri. Pada tanggal 31 Juli, Uwa Dadi, salah satu pemimpin pasukan La Sinrang, ditangkap. Setelah itu, La Sinrang juga ditangkap dan diasingkan ke Banyumas, Pulau Jawa. Setelah menjalani 31 tahun masa tahanan, ia dipulangkan ke Sawitto pada tahun 1937. La Sinrang meninggal dunia pada 29 Oktober 1938.¹⁵

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jenderal Van Heutzs menyampaikan keraguannya dalam pertimbangan serta sarannya bahwa pelanggaran yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan buat melakukan penaklukan tanpa memberikan peringatan sebelumnya. oleh sebab itu, Van Heutzs menekankan pentingnya berhati-hati supaya tidak memicu perlawanan atau memberi kesan bahwa pemerintah Belanda sedang mencari alasan buat menguasai Sulawesi Selatan secara eksklusif. ia pula menyatakan bahwa serangan militer pertama wajib ditujukan ke Bone, yg diklaim sebagai "kerajaan paling kuat dan paling berbahaya." Gubernur C.A. Kroesen sepakat bahwa Bone sebaiknya sebagai sasaran pertama, bukan hanya karena kekuatannya, namun juga karena "sikapnya yg kurang sopan."

Situasi ini mendorong Van Heutzs untuk segera melaksanakan kebijakan *politik perdamaian (pacificatie politiek)* melalui operasi militer di Sulawesi Selatan. Dalam surat bertanggal 14 Juli 1905 kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen, jelas tergambar keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukkan dan mengendalikan seluruh wilayah Sulawesi Selatan secara langsung. Surat tersebut pada dasarnya menginstruksikan gubernur untuk memaksa para penguasa atau raja di wilayah tersebut

¹⁴A Latif, "Concepts of Wanua and Palili: The Buginese Political Geography in Confederation of Ajatappareng in South Sulawesi," *SUSURGALUR* (2015), <https://www.journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/91>.

¹⁵Abd Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa* (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993).

agar menyerahkan kekuasaan mereka dengan tunduk, patuh, dan sepenuhnya mematuhi pemerintah Belanda melalui penandatanganan *korte verklaring* (pernyataan singkat) dalam waktu dekat. Pernyataan ini disusun berdasarkan perubahan kebijakan politik yang disampaikan dalam Pidato Tahta (Troonrede) Ratu Belanda tahun 1901, yang menjadi dasar bagi Politik Etis di Hindia Belanda serta memberikan alasan diplomatis untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.¹⁶

Tidak mengherankan bahwa Dirk Fock, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1921 hingga 1926, menyatakan bahwa ekspedisi militer dilakukan karena raja dan penguasa Sulawesi Selatan tidak mematuhi perjanjian dan bersikap tidak adil terhadap rakyat mereka. Beberapa kerajaan bahkan dituduh menampung pencuri dan penadah barang curian. Sebaliknya, Cramer menyatakan bahwa karena pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kepulauan tersebut, mereka merasa berhak untuk mengambil tindakan bersenjata. Pernyataan-pernyataan ini seolah-olah mendukung tindakan militer Belanda, yang dianggap memiliki tujuan moral untuk memperbaiki, memajukan, dan memberikan manfaat kepada penduduk pribumi, sesuai dengan konsep Politik Etis yang dibuat oleh Kabinet A. Kuiper pada tahun 1901.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pasifikasi politik hanyalah trik. Ini ditunjukkan oleh banyak tuntutan yang diajukan kepada penguasa kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk menyerahkan wilayah kepada pemerintah Belanda, membayar ganti rugi atas pajak impor dan ekspor, dan memberikan izin kepada Belanda untuk mengawasi pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di sana. Saat tuntutan ini ditolak, pemerintah Belanda segera menyiapkan pasukan pendudukan dan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menentang mereka. Banyak kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Sawitto, menolak ekspedisi militer Belanda yang disebut *Zuid Celebes Expeditie* 1905.

Perlawanan Sawitto terhadap Eskpedisi Belanda

Kerajaan Sawitto adalah kerajaan lokal yang pernah eksis di Kabupaten Pinrang meruapakan salah satu kerajaan yang melakukan perlawanan terhadap ekspedisi militer Pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan.¹⁷ Perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap

¹⁶Mattulada, *Sejarah Masyarakat Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998).

¹⁷Ahmad M Sewang, Musafir Pababbari, and Darussalam Syamsuddin, "Leadership In The Kingdom Of Mandar," *Nurkidam / 215 Journal of Research and Multidisciplinary* 3, no. 1 (2020): 215–221, <http://journal.alhikam.net/index.php/jrm>.

ekspedisi kolonial Belanda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Ajatappareng. Kerajaan Sawitto, yang terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan, memiliki posisi strategis baik secara ekonomi maupun politik.¹⁸ Keberadaan kerajaan ini menjadi perhatian Belanda karena Sawitto menolak tunduk sepenuhnya pada kekuasaan kolonial. Penolakan Sawitto terhadap Belanda pun berujung pada konflik bersenjata yang melibatkan tokoh-tokoh perlawanan lokal, termasuk figur karismatik La Sinrang yang menjadi ikon perlawanan rakyat Sawitto.

Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan pasifikasi, yaitu upaya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah di luar Jawa ke dalam administrasi kolonial Hindia Belanda melalui penundukan militer. Di Sulawesi Selatan, kebijakan ini mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal yang mempertahankan kedaulatan mereka. Kerajaan Sawitto, yang memiliki sejarah panjang sebagai entitas merdeka, menolak campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri mereka. Penolakan ini dipandang Belanda sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan kolonial di wilayah Ajatappareng dan memicu ekspedisi militer pada tahun 1905 untuk menaklukkan Sawitto.¹⁹

Perlawanan Sawitto terhadap Belanda dipimpin oleh seorang tokoh lokal bernama La Sinrang. La Sinrang, yang berasal dari keluarga bangsawan, memiliki reputasi sebagai pemimpin yang berani dan cakap dalam strategi militer. Ia memobilisasi masyarakat setempat untuk melakukan perlawanan dengan taktik gerilya, yang melibatkan serangan mendadak dan penguasaan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda. Dengan keahliannya, La Sinrang berhasil memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda dan menghambat upaya kolonial untuk menaklukkan Sawitto. Serangan-serangan yang dipimpin La Sinrang ini menunjukkan keberanian dan tekad masyarakat Sawitto dalam mempertahankan wilayah mereka dari dominasi asing.²⁰

Belanda berusaha meredam perlawanan La Sinrang dengan berbagai cara, termasuk bujukan, ancaman, dan penangkapan tokoh-tokoh penting di Sawitto. Ketika upaya persuasi gagal, Belanda kemudian menerapkan taktik represif dengan menangkap anggota keluarga La Sinrang, termasuk ayah dan istrinya, untuk memaksanya

¹⁸Hasaruddin Hasaruddin et al., "TRACKING THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF KEDATUAN SAWITTO IN SOUTH SULAWESI IN THE XVI-XVII CENTURY," *Jurnal Adabiyah* (2021).

¹⁹Edward L. Poelinggomang dkk, *Sejarah Dan Budaya Sulawesi Barat* (Makassar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2012).

²⁰Darwas Rasyid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian* (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985).

menyerah.²¹ Namun, La Sinrang tetap melanjutkan perjuangannya dan berhasil mengorganisir perlawanan di berbagai wilayah sekitar Sawitto, seperti Jampue, Alitta, dan Suppa. Taktik penekanan psikologis yang digunakan oleh Belanda ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman perlawanan La Sinrang terhadap stabilitas kolonial di Sulawesi Selatan.

Akhirnya, setelah beberapa waktu melakukan perlawanan yang intens, La Sinrang berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Setelah penangkapannya, ia diasingkan ke Pulau Jawa sebagai langkah untuk menghentikan perlawanan rakyat Sawitto. Meski La Sinrang telah tertangkap, semangat perlawanan rakyat Sawitto tidak mudah dipadamkan. Keberanian La Sinrang di medan pertempuran menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat untuk tetap menghormati kedaulatan mereka. Bahkan, meski di bawah tekanan kolonial, perlawanan ini memberikan dampak jangka panjang terhadap identitas dan solidaritas masyarakat Sawitto.²²

Setelah perlawanan Sawitto berhasil dipadamkan, Belanda memperkuat kontrol administratif mereka di wilayah tersebut. Kerajaan Sawitto dan sekitarnya dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan kolonial, di mana peran raja hanya bersifat simbolis. Sawitto menjadi bagian dari afdeling Parepare, dengan pengawasan yang ketat oleh pejabat kolonial. Proses ini memperlihatkan bagaimana Belanda secara bertahap menghapus otonomi kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Sawitto, dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem kolonial. Struktur birokrasi kolonial ini mengurangi kekuasaan tradisional para bangsawan dan raja, yang secara perlahan hanya berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintahan kolonial.²³

Walaupun akhirnya takluk, perlawanan Sawitto terhadap ekspedisi Belanda tetap dikenang sebagai simbol perjuangan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan mereka dari penjajahan. Perjuangan La Sinrang dan masyarakat Sawitto menginspirasi generasi selanjutnya untuk tetap menghargai nilai-nilai kemandirian dan keutuhan wilayah. Kisah perlawanan ini menjadi bagian penting dalam sejarah lokal Sulawesi Selatan, mengajarkan nilai keberanian dan kecintaan terhadap tanah air.

Perubahan Sistem politik

1. Kerajaan Sawitto, seperti banyak kerajaan lokal lainnya di Sulawesi Selatan, mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Salah

²¹Haji Paewa, *Lontarak Akkarungeng Sawitto*, n.d.

²² Syahrir Kila, *Sejarah Islam Di Pinrang* (Ujung Pandang: DEPDIKBUD Provinsi Sulawesi Selatan, n.d.).

²³ Syahrir Kila, *Hubungan Kerajaan Suppa Dan Bone* (Makassar: De Lamacca, 2013).

satu langkah yang diambil oleh pemerintah kolonial adalah membagi sistem administrasi pemerintahan menjadi tujuh wilayah yang disebut afdeling. Ketujuh wilayah tersebut mencakup Makassar, Bonthain, Parepare, Luwu, Mandar, serta pesisir timur Sulawesi (Boeton en Oskust Celebes). Setiap wilayah dipimpin oleh seorang Asisten Residen yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Gubernur mengenai semua urusan di wilayah tersebut. Selain itu, setiap wilayah juga dibagi menjadi beberapa area administratif yang dikenal sebagai "distrik."²⁴ Kerajaan Sawitto terletak dalam afdeling Parepare, yang disebut distrik Sawitto, di mana jabatan penguasa distrik dipegang oleh seorang pejabat pemerintah bumiputera.

2. Penghapusan Kedaulatan Lokal

Secara perlahan, kedaulatan Kerajaan Sawitto sebagai kerajaan merdeka mulai dihapuskan. Raja Sawitto dan para bangsawan lokal kehilangan sebagian besar kekuasaan politik mereka, yang beralih ke tangan pemerintah kolonial Belanda.²⁵ Kebijakan ini membatasi otoritas raja dan bangsawan, sehingga peran mereka hanya menjadi pemimpin simbolis di bawah pengawasan langsung pemerintah kolonial.

3. Pembentukan Pemerintahan Kolonial

Belanda mendirikan struktur pemerintahan baru di Sawitto yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial mereka. Mereka mengangkat residen atau asisten residen untuk mengawasi dan mengatur pemerintahan lokal. Sistem birokrasi baru diperkenalkan untuk menggantikan struktur pemerintahan tradisional kerajaan, sehingga Kerajaan Sawitto terintegrasi ke dalam sistem kolonial Belanda.

4. Reaksi dan Perlawanan Lokal

Perubahan dalam sistem politik ini menyebabkan ketidakpuasan di antara rakyat dan bangsawan lokal, yang memicu perlawanan terhadap Belanda, termasuk di Sawitto pada tahun 1905-1906. Meskipun perlawanan tersebut akhirnya dapat dipadamkan, usaha untuk menjaga kedaulatan dan identitas lokal tetap menjadi aspek penting dalam sejarah Sawitto.

Kesimpulan

²⁴M Amir, *KONFEDERASI AJATAPPARENG (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-16)* (de la macca, 2013).

²⁵STEPHEN C. DRUCE, "Ajattappareng 1200 to 1600," in *The Lands West of the Lakes*, 2013.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20 didorong oleh penolakan terhadap kebijakan pajak pelabuhan yang diterapkan pemerintah kolonial. Kebijakan ini, yang mencakup pungutan cukai impor, ekspor, dan pajak pelabuhan, dinilai membebani ekonomi lokal. Selain itu, intervensi pemerintah kolonial dalam urusan domestik kerajaan juga memicu konflik, mengingat tindakan tersebut dianggap merongrong kedaulatan kerajaan dan mencampuri hak penguasa setempat.

Kekalahan Sawitto dalam perlawanan ini memfasilitasi konsolidasi kekuasaan Belanda, menandai integrasi wilayah ini ke dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Perubahan signifikan pun terjadi dalam struktur politik lokal; kekuasaan raja yang sebelumnya memiliki wewenang administratif berkurang menjadi peran simbolis semata. Dengan demikian, Belanda berhasil memperkuat kontrolnya melalui pembatasan peran politik penguasa lokal, yang pada akhirnya menghilangkan otonomi politik yang dimiliki Kerajaan Sawitto.

Temuan ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak kolonialisme terhadap dinamika politik dan posisi kerajaan-kerajaan lokal, khususnya di Sulawesi Selatan. Konsolidasi kekuasaan kolonial tidak hanya mengubah struktur politik tetapi juga menggeser posisi penguasa lokal dari pemimpin berdaulat menjadi simbol di bawah kontrol administrasi kolonial. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang strategi kolonial dalam mengintegrasikan wilayah-wilayah di luar Jawa dan Madura serta implikasinya terhadap tatanan politik lokal.

Daftar Pustaka

- Abd. Latif. "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906 Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis Di Sulawesi Selatan." Universitas Kebangsaan Malaysia, 2012.
- Abd Razak Daeng Patunru. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993.
- Ahmad Yani. *Melintasi Rentang Waktu Eksistensi Masyarakat Bugis- Makassar Pasca Perang Melawan VOC Belanda*. Edited by Saidin Hamzah. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Amir, M. *KONFEDERASI AJATAPPARENG (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-16)*. de la macca, 2013.
- Amir, M, and S Kila. "Perlawanan Rakyat Ajatappareng: Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda Di Sulawesi Selatan Tahun 1905-1906." (*No Title*) (2013). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794594695424>.
- Amir, Muhammad. "Perlawanan Sawitto Terhadap Belanda Di Sulawesi Selatan Pada 1905-1906." *Walusuji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 9, no. 1 (2019): 1-21.
- Darwas Rasyid. *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian*. Balai Kajian

- Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985.
- DRUCE, STEPHEN C. "Ajattappareng 1200 to 1600." In *The Lands West of the Lakes*, 2013.
- Edward L Poelinggomang dkk. *Sejarah Dan Budaya Sulawesi Barat*. Makassar: Kementerian Pendiidkan dan Kebudayaan [Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2012.
- Fachriya, Fachriyadi, and Ahmad Yani. "Dinamika Masyarakat Teluk Bone Di Era Gejolak DI/TII." *JAWI* 7, no. 1 (2024).
- Hasaruddin, Hasaruddin, Sitti Mania, Ahmad Yani, and Musyarif Musyarif. "TRACKING THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF KEDATUAN SAWITTO IN SOUTH SULAWESI IN THE XVI-XVII CENTURY." *Jurnal Adabiyah* (2021).
- Latif, A. "Concepts of Wanua and Palili: The Buginese Political Geography in Confederation of Ajatappareng in South Sulawesi." *SUSURGALUR* (2015). <https://www.journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/91>.
- . "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906: Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis Di Sulawesi Selatan." *Bangi: Disertasi Fakultas Sains Sosial dan ...* (2012).
- Mattulada. *Sejarah Masyarakat Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998.
- Paewa, Haji. *Lontarak Akkarungeng Sawitto*, n.d.
- Penyusun, Tim. *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang*. Pinrang: Daerah Tingkat II Kab. Pinrang, 1988.
- Poelinggomang, Edward L. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Makassar: Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, 2005.
- Sewang, Ahmad M, Musafir Pababbari, and Darussalam Syamsuddin. "Leadership In The Kingdom Of Mandar." *Nurkidam | 215 Journal of Research and Multidisciplinary* 3, no. 1 (2020): 215-221. <http://journal.alhikam.net/index.php/jrm>.
- Syahrir Kila. *Hubungan Kerajaan Suppa Dan Bone*. Makassar: De Lamacca, 2013.
- . *Sejarah Islam Di Pinrang*. Ujung Pandang: DEPDIKBUD Provinsi Sulawesi Selatan, n.d.
- Yani, Ahmad. "DAMPAK PERANG MAKASSAR TERHADAP UMAT ISLAM SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII." *Jurnal Rihlah* (2018).
- Yani, Ahmad, and M Hum. *SEJARAH LOKAL SULAWESI SELATAN : MENYUSURI EKISTENSI KEDATUAN SAWITTO DI AJATAPPARENG ABAD XVI-XVII*, 2022.